



PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DEMOKRASI GENERASI MILENIAL

Enick Kusrini, Aida Munawaroh, Siti Tiara Maulia

Universitas Jambi
enikusrini2017@gmail.com

Abstract

Technological developments have greatly influenced the millennial generation's awareness of democracy. In the current digital era, people are free to express their aspirations, one of which is on social media. Social media can provide universal access. Anyone can access social media sites and use them to speak and express opinions. Social media provides access, then connects everyone through the exchange of issues and discourse, even though these people have never directly known each other. Through social media, information is also obtained faster and makes it easier for users to participate, especially in the realm of democracy.

Article History

Received: 15 Maret 2023
Reviewed: 20 Maret 2023
Published: 5 April 2023

Key Words

Social media, Democracy, Millennial generation.

Abstrak

Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kesadaran generasi milenial terkait demokrasi. Di era digital saat ini membuka kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya salah satunya di media sosial, Media sosial dapat menyediakan akses yang universal. Siapa pun, dapat mengakses situs-situs media sosial dan menggunakannya untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Media sosial memberi akses, kemudian menghubungkan tiap orang melalui pertukaran isu dan wacana, sekalipun orang-orang tersebut tidak pernah mengenal secara langsung satu sama lain. Melalui media sosial juga informasi yang didapat lebih cepat dan lebih memudahkan penggunaannya untuk ikut berpartisipasi terutama dalam ranah demokrasi.

Sejarah Artikel

Received: 15 Maret 2023
Reviewed: 20 Maret 2023
Published: 5 April 2023

Kata Kunci

Media sosial, Demokrasi, Generasi milenial..

Pendahuluan

Sejak merdeka pada 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara harafiyah demokrasi berasal dari dua kata yakni 'demos' dan 'kratos'. Dalam bahasa Yunani, dua kata tadi bermakna sebagai sebuah sistem pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat. Untuk memahami demokrasi secara lebih dalam Wahyudi (2005, h.24) mendeskripsikan jika, Demokrasi dinilai sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan "non-material" manusia. Nilai-nilai demokrasi akan dapat memanusiaikan manusia, sebab nilai-nilainya bertitik tolak dari nilai-nilai luhur. Anggapan ini muncul karena beberapa faktor, diantaranya penderitaan manusia akibat fasisme, totaliterianisme, komunisme, dan paham-paham antidemokrasi lainnya. Penjabaran itu menggambarkan bahwa demokrasi adalah kebutuhan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan dalam demokrasi juga dianggap sebagai kebutuhan mendasar.

Kualitas demokrasi dalam sebuah negara ditentukan oleh kualitas partisipasi warganya. Keterlibatan warga negara dalam melakukan partisipasi dimungkinkan karena tersedianya ruang yang cukup untuk melakukan partisipasi yang dijamin oleh negara, juga kemampuan dan keterampilan dari warga negara untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk dan berbagai macam aspek. Dalam hal ini, mulai mencanangkan inisiatif untuk pembuatan



agenda publik, memonitor, mengevaluasi menganalisis, dan mengkritisi kebijakan, sampai melakukan konsensus atau musyawarah.

Secara umum disepakati bahwa untuk dapat menjalankan perannya secara baik dalam negara demokratis warga negara perlu memiliki dan menguasai beberapa persyaratan seperti dijelaskan oleh Margaret Stimmann Branson (1999: 8) bahwa terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu warga negara harus mempunyai pengetahuan yang cukup (civic knowledge), kemudian keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan sikap kewarganegaraan (civic disposition) yang baik. Namun, kompetensi kewarganegaraan perlu dilengkapi dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. sehingga demokrasi yang berkualitas dapat dicapai dan sekaligus memberikan manfaat terhadap kesejahteraan bersama (civic virtue).

Di era digital saat ini membuka kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Berbagai platform hadir memberikan kebebasan bagi penggunanya dalam berinteraksi, terutama dalam menyampaikan pendapat. Dengan hadirnya kemajuan teknologi memudahkan untuk mengakses internet, sehingga saat ini semua masyarakat terutama generasi milenial sudah memiliki media sosial yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi juga menuntut masyarakat agar memiliki kecakapan digital dan menggunakannya dengan baik.

Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana pengguna diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan/mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial.

Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, ustaz, mahasiswa, pelajar. Pengguna media sosial bebas membuat pesan, mengedit, menambahkan, memodifikasi tulisan, gambar dan video, grafis dan sebagainya. Semua dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.

Dalam hal demokrasi media sosial tentunya memiliki peran penting terutama berkaitan dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat. Media sosial mampu memberikan ruang bagi penggunanya untuk berperan aktif dan ikut terlibat dalam perkembangan demokrasi, sehingga sistem pemerintahan dapat terpantau dan berjalan dengan baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan ciri-ciri umum yang dapat berubah atau berkembang tergantung pada keadaan. Presentasi bersifat deskriptif karena hasil pengumpulan data diceritakan daripada angka. Penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan, baik dengan menggunakan pendekatan pustakawan maupun dengan mengumpulkan literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan beserta dokumen-dokumen yang relevan.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan



perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan

Dokumen tentang keragaman suku, agama, ras, dan golongan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. dan kemudian, sebagaimana mestinya, suku, agama, ras, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk jurnal, laporan penelitian, jurnal akademik, surat kabar, buku yang relevan, hasil seminar, makalah akademik yang tidak dipublikasikan, sumber, keputusan, dll. Keanekaragaman antar kelompok dalam kerangka. Sumber data primer diperoleh dari literatur untuk penelitian ini

PEMBAHASAN

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Pengertian Demokrasi. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Secara istilah (etimologi) kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia* yang berarti “rule of the people”, merupakan paduan dari dua kata, *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam ucapan Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat ke 16) “democracy is government of the people, by the people, and for the people”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada kesempatan yang lain, Abraham Lincoln mengatakan “This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their constitutional rights of amending it, or their revolutionary right to dismember or overthrow it”. (Dikdik B. Arif, 2014: 73). Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Definisi lain dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yang menyatakan “the democracy method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people votes” (Metode yang demokrasi adalah suatu pengaturan kelembagaan guna mencapai keputusan politik, dimana setiap individu berusaha mendapatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan lewat kompetisi guna memperoleh suara rakyat). (Schumpeter, 1947).



Gaffar (Sri Wuryan dan Saefullah, 2009:85) mengatakan “democracy relates to the fundamental human rights, which includes freedom of expression, freedom of belief and freedom of action. To avoid chaos, in practice, democracy recognizes such values as responsibility, self discipline, objective, rational, love and care, respect for others, and acceptance of differences of opinions”. Berdasarkan pendapat tersebut, demokrasi berkaitan erat dengan hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam keyakinan, dan kebebasan berperilaku. Nilai-nilai demokrasi harus dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tanggung jawab, disiplin diri, berpikir objektif, dan rasional, kasih sayang dan peduli, respek terhadap sesama dan menerima perbedaan pendapat diantara sesama warga masyarakat.

Keberhasilan demokrasi yang ditandai oleh berdaulatnya rakyat dicerminkan oleh partisipasi warganya. Hal itu dapat dilakukan apabila ruang publik disediakan untuk semua orang, tidak dikooptasi oleh negara, dan warga negara mempunyai pengetahuan, keterampilan sifat, dan kompetensi. Ruang publik yang terbuka menjadi persyaratan yang dibutuhkan demokrasi (Evans & Boyte, 1986: 18).

Dalam demokrasi partisipatori yang saat ini kita anut, tersedia ruang partisipasi baru (new public sphere) yang disebut sebagai ruang publik digital. Ruang publik adalah tempat warga negara mengekspresikan diri, terjadinya transaksi antara warga dengan negara, sarana untuk untuk pembelajaran politik antarkedua elemen warga dan pemerintah, dan menjadi alat untuk meredam adanya potensi eksese kekuasaan negara terhadap rakyat dan anarki rakyat terhadap kewibawaan pemerintahan. Platform media sosial dominan digunakan warga untuk melakukan aktivitas politik dengan kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawabnya. Apabila partisipasi pada ruang publik baru ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka demokrasi yang kuat akan tercipta.

Partisipasi dengan karakteristik komunikasi di dunia digital saat ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru. Kematangan demokrasi akan terjadi apabila warga negara mempunyai kemampuan politik (political efficacy), yaitu kepercayaan yang kuat dalam diri bahwa mereka dapat melakukan perubahan dengan berpartisipasi. Dalam ruang publik yang tersedia dengan penguasaan teknologi dan cara-cara yang baru yang sesuai dan pantas, akan berdampak menciptakan demokrasi yang berkeadaban.

Hal ini bermakna bahwa terjadi pemberdayaan warga. Pemberdayaan warga juga dapat dipersiapkan melalui kontribusi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah maupun perguruan tinggi. Seperti diketahui, di perguruan tinggi mata kuliah ini menyiapkan warga negara muda dengan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi serta memberikan semangat untuk dapat berkomitmen agar siap melakukan partisipasi dalam kehidupan yang nyata. Kesadaran tentang adanya ruang publik yang baru menghendaki pembaharuan dalam konten dan konteks pembelajaran PKn di perguruan tinggi sehingga mereka dapat menjadi warga negara digital yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab

Media social (Social Networking) adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog,



sosial network atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".

Macam-Macam Media Sosial Teknologi media sosial sekarang ini memiliki berbagai berbagai bentuk seperti misalnya majalah digital, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, jejaring sosial, podcast, foto atau gambar, video, rating dan bookmark sosial. Masing –masing memiliki kelebihannya sendiri seperti blogging, berbagi gambar atau foto, video blogging, wall-posting, berbagi musik atau lagu, chatting, bahkan VoIP atau Voice over IP, dan lain sebagainya.

Dengan adanya media sosial, produksi dan penyebaran informasi kini tidak lagi dikuasai oleh media konvensional. Siapa pun dapat memproduksi informasi atau wacana sendiri, kemudian menyebarkan dengan cepat kemunculan media sosial juga memungkinkan bentuk-bentuk komunikasi yang lebih personal. Penyebaran informasi tidak lagi bersifat satu arah; dan bukan sekadar dua arah, tetapi informasi juga dipertukarkan "satu-satu".

Media sosial dapat menyediakan akses yang universal. Siapa pun, dapat mengakses situs-situs media sosial dan menggunakannya untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Media sosial memberi akses, kemudian menghubungkan tiap-tiap orang melalui pertukaran isu dan wacana, sekalipun orang- orang tersebut tidak pernah mengenal secara langsung satu sama lain.

Dengan demikian, media sosial juga memungkinkan pembentukan asosiasi yang didasari kesamaan konsumsi gagasan dan wacana. Dibantu miniaturisasi perangkat komunikasi sehingga mudah dibawa-bawa dan digunakan, setiap pengguna internet lantas dapat terhubung terus-menerus dengan wacana yang tengah marak diperbincangkan.

Menurut Yuswohady dalam artikel *Millennial Trends* (2016) Generasi milenial (*Millennial Generation*) adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Generasi ini sering disebut juga sebagai Gen-Y, Net Generation, Generation WE, Boomerang Generation, Peter Pan Generation, dan lain-lain. Mereka disebut generasi milenial karena merekalah generasi yang hidup di pergantian milenium. Secara bersamaan di era ini teknologi digital mulai merasuk ke segala sendi kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Lancaster & Stillman (2002) Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi millennial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, IG dan lain-lain, sehingga dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming.



Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir diantara tahun 1980-2000 saat terjadi kemajuan teknologi yang pesat. Jika dilihat dari kelompok umur, generasi milenial merupakan generasi yang saat ini berusia dikisaran 15–34 tahun.

Karakteristik Generasi Milenial, berdasarkan literatur dari artikel Hits.com, diketahui ada beberapa macam karakteristik dari generasi milenial yaitu: 1) milenial lebih percaya user generated content (UGC) daripada informasi searah, 2) milenial lebih memilih ponsel dibanding TV, 3) milenial wajib punya media sosial, 4) milenial kurang suka membaca secara konvensional, 5) milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif, 6) milenial cenderung melakukan transaksi secara cashless, 7) milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka, 8) milenial memanfaatkan teknologi dan informasi, 9) milenial cenderung lebih malas dan konsumtif, dan lain-lain.

Dengan karakteristik seperti itu warga negara memiliki kemampuan dalam melakukan partisipasi (political efficacy). Menurut Schulz (2005: 2) kemampuan berpolitik atau political efficacy adalah suatu kepercayaan warga negara bahwa kondisi sosial politik dapat diubah. Orang mau berpartisipasi dalam politik karena warga negara mempunyai kepercayaan politik dan mampu memainkan peran dalam melakukan perubahan tersebut.

Namun dalam hal ini akan membatasi ruang lingkup hanya pada beberapa karakteristik, yaitu milenial lebih percaya pada user generated content (UGC) daripada informasi searah, milenial memanfaatkan teknologi dan informasi dan milenial cenderung lebih malas dan konsumtif.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi milenial bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Konsep pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi terhadap pengembangan unsur-unsur yang harus dikuasai oleh setiap warga negara: pengetahuan, keterampilan nilai, komitmen dan kompetensi yang ideal yang harus dimiliki setiap warga negara dan pada akhirnya mampu menjalankan perannya dalam negara demokratis.

Dalam praktiknya, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dipahami sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Budimansyah, 2010).

Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan warga negara yang demokratis dengan kajian dan pembahasan yang mencakup pengetahuan tentang kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat menuju masyarakat madani. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) memberikan wawasan kepada peserta didik untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban (Intelligent and Civilized Citizens). Civic intelligence dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya



sebagai warga negara masyarakat, serta mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Ubaedillah dan Rozak, 2012:16).

Partisipasi warga digital dalam ruang publik telah banyak memberikan dampak positif. Namun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dampak negatif juga begitu nyata akan mengancam kelangsungan demokrasi. Oleh karena itu, pembelajaran Kewarganegaraan sudah selayaknya dituntut konsep dan konteksnya perlu memasukkan beberapa pengetahuan spesifik berkaitan dengan partisipasi. Zook (2019) mengusulkan lebih jauh bahwa kewarganegaraan digital harus mengandung konsep baru pembelajaran dengan peserta didik harus menguasai konsep penting penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, mereka dapat mengantisipasi perubahan praktik partisipasi di era digital ini. Terdapat tujuh konsep utama yang harus dikuasai warga negara digital di antaranya empati, memahami cara kerja internet, memahami data pengguna internet, literasi komputer/internet, memahami kesenjangan dalam penguasaan teknologi maju ini, mempraktikkan kenyamanan dan keharmonisan dalam partisipasi di dunia digital serta menggunakan media baru ini dengan aman.

Dalam era globalisasi ini, media sosial sangat diperlukan di setiap aktivitas manusia, tak terkecuali dalam lingkup dunia politik untuk kepentingan demokrasi. Ini karena media sosial dapat dijadikan ruang publik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pendapat, saran maupun kritik terhadap jalannya sistem demokrasi. Sebagian dari responden ini, mengakui ikut berpartisipasi dalam sosial media terkait demokrasi, seperti berkomentar pada kolom komentar. Namun dari mereka berpendapat bahwa lebih suka berpartisipasi secara langsung atau spontanitas tanpa terlibat di sosial media. Menurut Isbandi (2007: 27), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam proses mengidentifikasi permasalahan, maupun potensi yang ada di sekitar masyarakat. Meliputi proses memilih dan mengambil sebuah keputusan, baik alternatif solusi untuk menangani masalah, maupun proses pelaksanaan mengatasi masalah, serta keterlibatan dalam hal mengevaluasi perubahan yang terjadi. Masyarakat dalam berpartisipasi merupakan suatu perwujudan dari demokrasi.

Demokrasi sebagai landasan bagi hadirnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahan yang baik, terutama dalam fungsi pengawasan dan pembahasan suatu peraturan. Dan dengan adanya penggunaan media sosial, pertumbuhan partisipasi masyarakat terutama di kalangan milenial tentunya meningkat walaupun partisipasi tidak secara langsung.

Penggunaan media sosial pastinya memberikan kontribusi, baik secara positif maupun negatif terhadap pelaksanaan demokrasi. Dalam kontribusi negatif, yang lekat pada saat ini adalah informasi hoax. Hoax (berita bohong) merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Oknum pembuat konten hoax umumnya dilatarbelakangi beberapa motif, mulai dari ekonomi, politik dan tidak sedikit juga yang berlandaskan pada eksistensi di dunia maya. Bentuknya beragam mulai dari berita bohong, ujaran kebencian berdasarkan SARA, provokasi, pemutarbalikkan fakta, terorisme dan



konten-konten negatif lainnya. Kini, banyak muncul hoax di sosial media, khususnya topik tentang politik.

Terkait penyalahgunaan media sosial, hampir semua masyarakat terutama dikalangan generasi milenial mengatakan bahwa penyalahgunaan media akan dapat merubah prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Karena informasi yang tidak benar dan mudahnya kepercayaan masyarakat dapat merubah kepribadian dari masyarakat itu sendiri secara perlahan. Maraknya penyebaran hoax di tengah masyarakat kini telah mengancam jalinan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di ruang-ruang sosial. Dapat dilihat secara nyata, bahwa hoax bisa memunculkan adanya permusuhan dan perpecahan pada sekelompok masyarakat. Itu artinya bahwa hoax juga akan berpengaruh pada runtuhnya persatuan dan keutuhan bangsa. Dan ini juga telah menyimpang nilai-nilai yang ada pada Pancasila sebagai landasan demokrasi bangsa Indonesia. Untuk itu perlu adanya kebijakan atau aturan berkaitan dengan penggunaan media sosial, seperti UU ITE. Agar penggunaan media sosial dalam pelaksanaan demokrasi khususnya dapat diarahkan dan dibatasi sesuai nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kepentingan Bersama.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas memperoleh kesimpulan bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap demokrasi masyarakat terutama di kalangan generasi milenial. Melalui media sosial masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya terkait sistem demokrasi yang sedang berkembang. Media sosial juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi milenial dalam hal politik, karena melalui media sosial pengguna nya dapat mengikuti informasi lebih cepat dan memberikan komentarnya. Selain dampak positif, media sosial juga memberikan dampak negatif terhadap demokrasi masyarakat terutama generasi milenial. Seperti banyaknya penyebaran berita hoax oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengenai informasi politik yang sedang terjadi, hal tersebut tentunya berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat terkait sistem pemerintahan. Karena-nya masyarakat terutama generasi milenial dituntut untuk lebih demokratis dalam hal menggunakan kebijakan yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Rahmawati, D. (2014). Media Sosial Dan Demokrasi Di Era Informasi. Jurnal Vokasi Indonesia. Vol 2(2):18-29
- Roza, P. (2020) Digital Citizenship: Menyiapkan Generasi Milenial Menjadi Warga Negara Demokratis di Abad Digital. Jurnal Sositologi. Vol 19(2):190-202
- Susanto, D.R. Irwansyah. (2021). Sosial Media, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca Reformasi. Jurnal Lontar. Vol 9(1):65-77
- Budiarti, S. dkk. Pengaruh Media Sosial Terhadap Prilaku Remaja. Vol 3(1):47-51
- Hidayatullah, S. dkk. (2018). Perilaku Generasi Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi Go Food. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol 6(2):240-249